



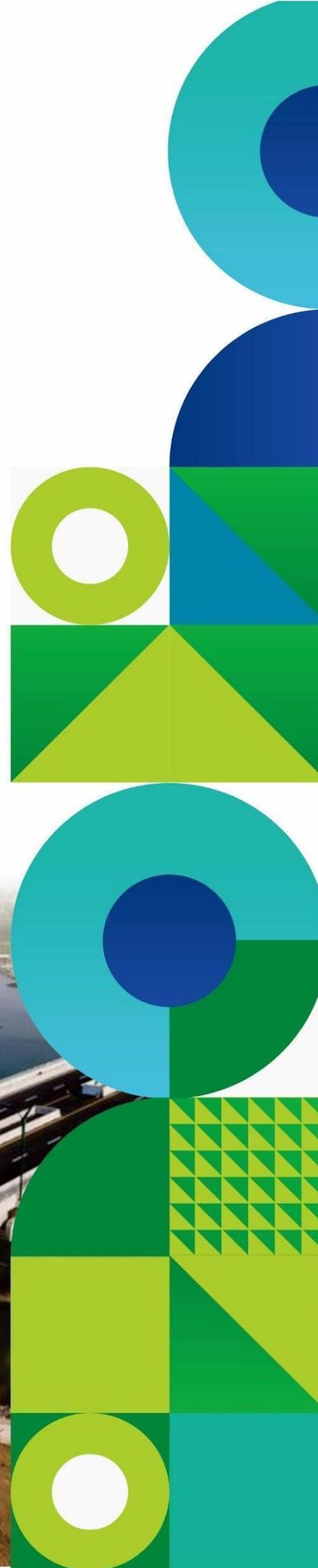
DINAS KESEHATAN
ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

LAPORAN KINERJA

Dinas Kesehatan Kab. Bantul



2023





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun coordinating pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 16 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.

NIP. 197008312002121003





Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kesehatan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan kesehatan;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; d. penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan;
- g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kesehatan;
- h. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- k. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- l. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 IKU:

No	IKU	Target	Realisasi	Presentase
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	80.7 per 100.000 KH	84,36	95.46
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,3 per 1000 KH	7.59	96.03
3	Case Fatality Rate Covid-19	2,5 %	5.3	-12
4	Insidence Rate DBD	120 per 100.000 Penduduk	14	188.33
5	Prevalensi Stunting	8.5%	6.45	124.12

Dari di atas dapat di simpulkan bahwa dari kelima IKU yang di ampu Dinas Kesehatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Ada 4 (Empat) Indikator yang pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Insidence Rate DBD
4. Prevalensi Stunting

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria rendah , yaitu :

1. Case Fatality Rate Covid-19

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kesehatan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.





Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja.....	6
G. Peta Proses Bisnis.....	7
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
1. Tujuan dan Sasaran	12
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	20
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	20

Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	23
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
3.2.1. Evaluasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan.....	25
3.2.2. Analisa Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	27
3.2.3 Evaluasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat	40
3.2.4 Analisa Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat	41
3.3. Akuntabilitas Anggaran.....	52
3.4. Efisiensi Sumber Daya	54
3.5. Lintas Sektor.....	55
Penutup.....	57





Daftar Tabel

TABEL I.1 1 JUMLAH PEGAWAI MENURUT KUALIFIKASI JABATAN, JENIS KELAMIN DAN KOMPETENSI	5
TABEL II.1 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	13
TABEL II. 2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN	14
TABEL II.3 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
TABEL II.4 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2023	21
TABEL III.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	24
TABEL III.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023	24
TABEL III.3 RUMUSAN INDIKATOR DAN FORMULASI PERHITUNGAN	26
TABEL III.4 RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	27
TABEL III.5 PENYEBAB KEMATIAN IBU DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018-2023	29
TABEL III.6 ANALISIS BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB KEMATIAN IBU DI KABUPATEN BANTUL	30
TABEL III.7 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG MENDUKUNG PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU	31
TABEL III.8 PENYEBAB KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2022	34
TABEL III.9 ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN BANTUL	35
TABEL III.10 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG MENDUKUNG UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI	36
TABEL III.11 CASE FATALITY RATE COVID-19 DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020-2023	39
TABEL III.12 ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CASE FATALITY RATE COVID-19 DI KABUPATEN BANTUL	39
TABEL III.13 RUMUSAN INDIKATOR DAN FORMULASI PERHITUNGAN	41
TABEL III.14 RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN SASARAN	41
TABEL III.15 JUMLAH KASUS DBD DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018-2023	43
TABEL III.16 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG MENDUKUNG UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN/INCIDENCE RATE DBD	44
TABEL III.17 JUMLAH BALITA STUNTING DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2023	46
TABEL III.18 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG MENDUKUNG UPAYA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING	47
TABEL III.19 ANALISA DAN FAKTOR PENYEBAB BALITA STUNTING	48
TABEL III.20 ALOKASI ANGGARAN BELANJA PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023	53
TABEL III.21 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	54
TABEL III.22 EFISIENSI ANGGARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023	55



DINAS KESEHATAN
Kabupaten Bantul



Daftar Gambar

GAMBAR III.1 ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN BANTUL, DIY DAN NASIONAL TAHUN 2018-2022	29
GAMBAR III.2 PENDAMPINGAN DOKTER SPOG KE 27 PUSKESMAS	31
GAMBAR III. 3 PENDAMPINGAN USG OLEH RESIDEN PPDS OBGYN RS DR. SARDJITO UGM	32
GAMBAR III.4 DISKUSI KASUS MATERNAL MINGGUAN (DISKAS MAMI)	32
GAMBAR III.5 ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN BANTUL, DIY DAN NASIONAL TAHUN 2018-2023	34
GAMBAR III.6 PENDAMPINGAN DOKTER SP. OG DI 27 PUSKESMAS	37
GAMBAR III.7 PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK MELALUI GERAKAN 1 RUMAH 1 JUMANTIK (G1R1J)	45
GAMBAR III.8 FOGING DALAM RANGKA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK	45
GAMBAR III.9 PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN BANTUL DAN DIY TAHUN 2019-2023	47
GAMBAR III.10 PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN BALITA STUNTING DAN MALNUTRISI OLEH DOKTER AHLI (SP.A) DI 27 PUSKESMAS SE-KABUPATEN BANTUL	50
GAMBAR III.11 PEMERIKSAAN BALITA MALNUTRISI DI 27 PUSKESMAS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK.	50
GAMBAR III.12 PELACAKAN AKTIF MASALAH GIZI	51
GAMBAR III.13 PELATIHAN PMBA (PEMBERIAN MAKAN BALITA DAN ANAK)	51



Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dilaporkan merupakan suatu bentuk Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP yang disusun Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

B. Pembentukan OPD

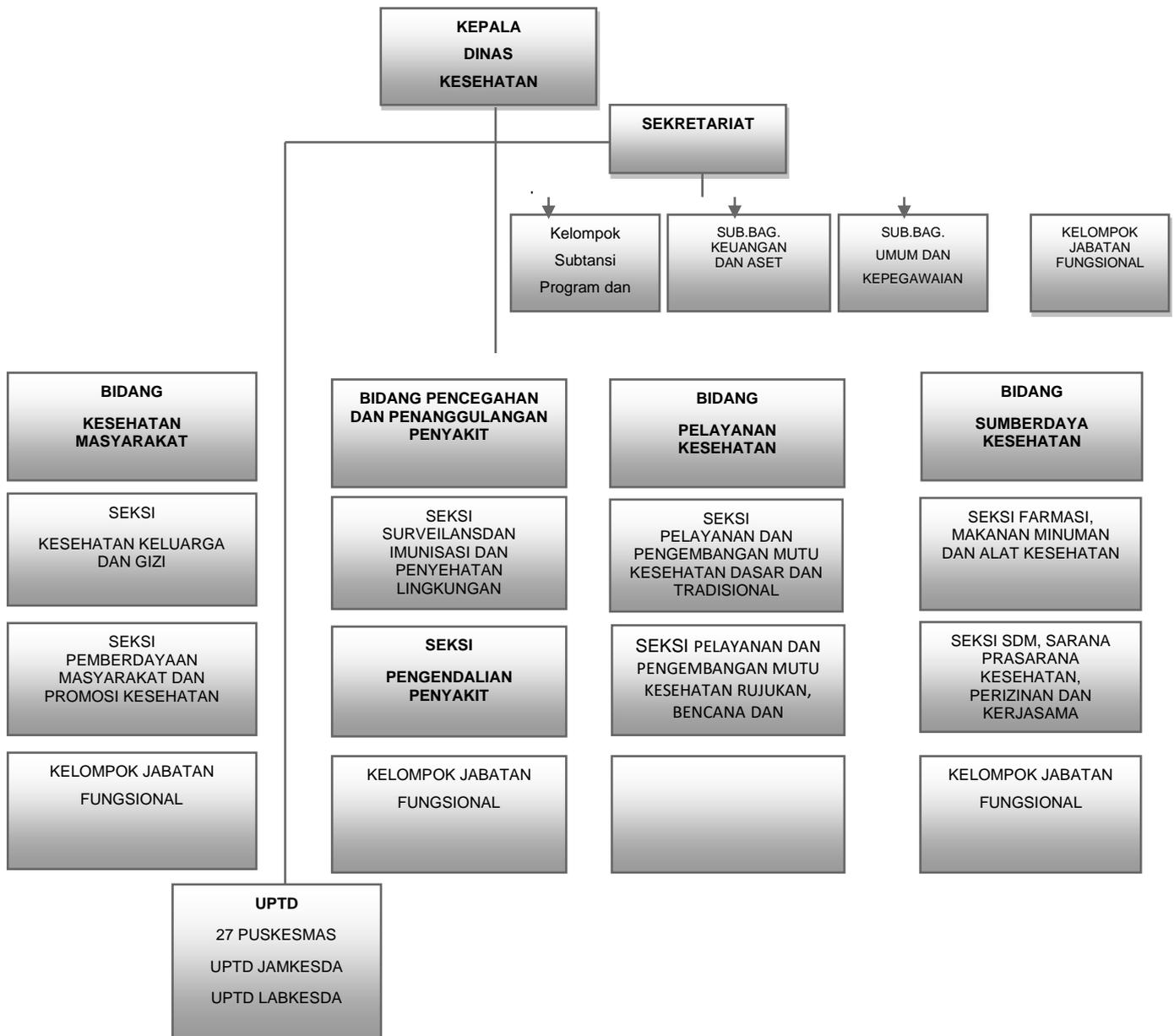
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan menetapkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan kesehatan;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

- d. Penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perzinandan/atau nonperizinan di bidang kesehatan;
- i. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- i. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- j. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- l. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas

C. Susunan Organisasi



D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki	Perempuan	
1	2	3	4				5	6						7	8	
			S2	S1	D3	SM A		S3	S2	D4/S1	D3	D1/SM A	SMP	SD		
I	ASN															
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1		1						1	
B.	Jabatan Administrasi															
	1. Administrator	6	4	2			6	1	3	2					4	2
	2. Pengawas	43	7	32	4		42		7	31	4				17	25
	3. Pelaksana	446		26	224	196	113		2	28	24	50	8	1	41	72
C.	Jabatan Fungsional	1401		452	949		1034		13	311	709	1			100	934
II.	Non ASN						452			100	192	160			182	270
	Jumlah	1897	12	512	1177	196	1648	1	26	472	929	211	8	1	345	1303

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kesehatan relatif tinggi dan lebih tinggi perempuan dibanding dengan laki-laki, didominasi oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 929 orang (56.37%), S1/D4 sebanyak 472 orang (28.64%), SLTA sebanyak 211 orang (12.80%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 26 orang (1.58%), SMP sebanyak 8 orang (0.49%), pendidikan SD sebanyak 1 orang (0.06%) dan yang terakhir jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang (0.06%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

E. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan terdapat beberapa isu-isu strategis yang harus diantisipasi agar dampaknya dapat diminimalisir dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang akan ditangani adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan
2. Penurunan kematian ibu dan balita
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (Universal Health Coverage)
5. Peningkatan dan pemberdayaan UKBM
6. Peningkatan status gizi masyarakat
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
8. Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



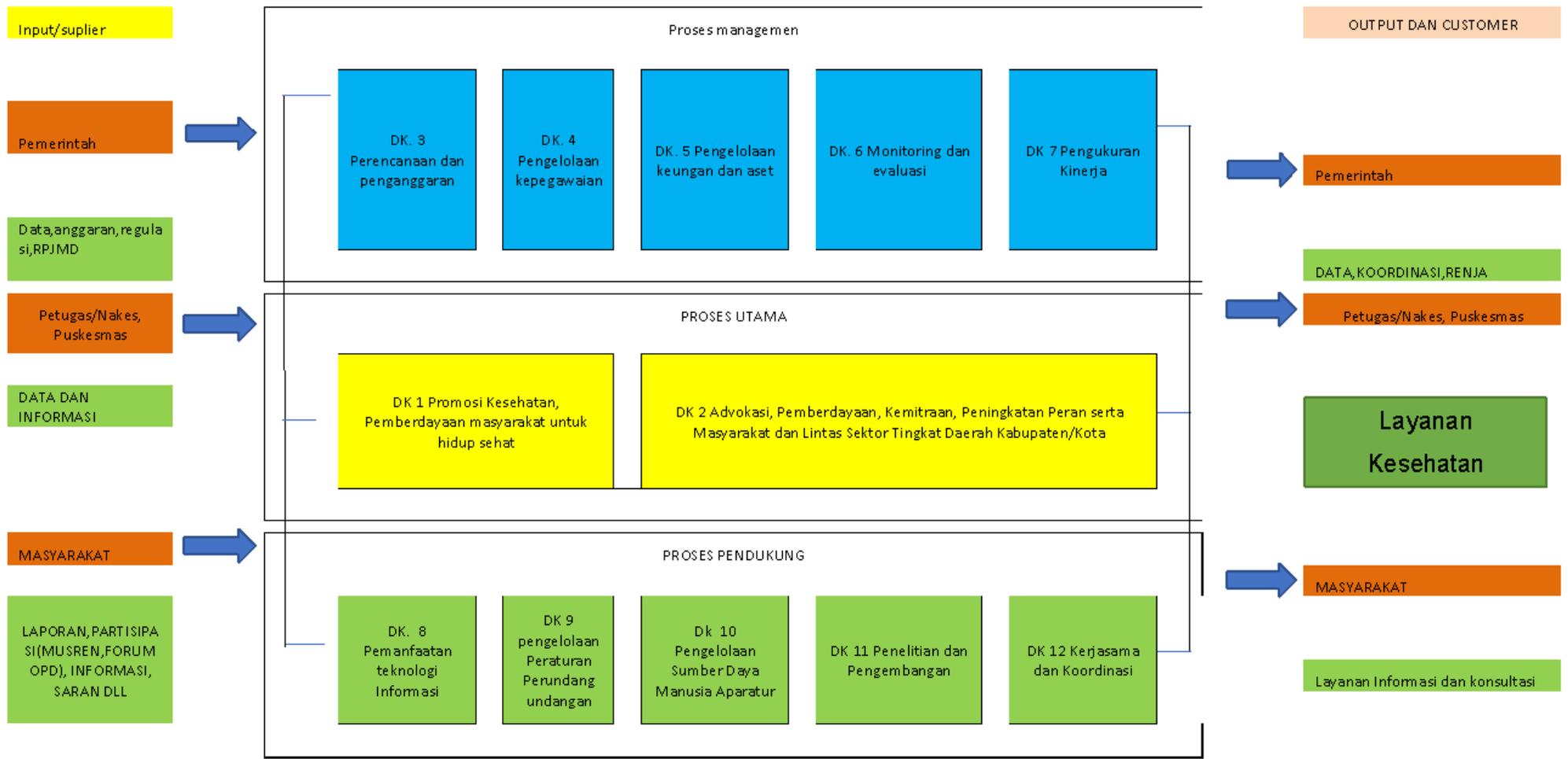
G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Kesehatan:

PETA PROSES BIDANG KESEHATAN

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan





H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/064.C/Ev.SAKIP/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;	Dinas Kesehatan telah menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal
2.	Mempublikasikan laporan kinerja dalam website sehingga bisa mudah diakses setiap saat. (sudah ditindaklanjuti)	Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti saran rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan mempublikasikan laporan kinerja di website Dinas Kesehatan.
3.	Meningkatkan upaya dan langkah strategis untuk menurunkan angka kematian Ibu yang capaian kerjanya masih rendah.	Dinas Kesehatan telah meningkatkan upaya dan langkah strategis untuk menurunkan angka kematian Ibu.



Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Kesehatan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Kesehatan sebagai berikut :

MISI 2: *Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa*

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Kesehatan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Sedangkan sasaran Dinas Kesehatan adalah (1) Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan, (2) Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat sehat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) :

- 1) Angka Kematian Ibu
- 2) Angka Kematian Bayi
- 3) Case Fatality Rate Covid 19
- 4) Insiden Rate DBD
- 5) Prevalensi Stunting

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu
			Angka Kematian Bayi
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Case Fatality Rate Covid 19
			Insiden Rate DBD
			Prevalensi Stunting

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kesehatan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan				
MISI ke 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan dan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
			Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
			Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	
	2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
				Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
				Pengembangan Potensi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu
2		Angka Kematian Bayi
3		Case Fatality Rate Covid 19
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD
5		Prevalensi Stunting

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id>.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Kesehatan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada <https://esakip.kab-bantul.id>.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr AGUS TRI WIDIYANTARA, MMR

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANTUL

DINAS KESEHATAN
dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, MMR
NIP. 197008312002121003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	80,7	Triwulan I	80,7
					Triwulan II	80,7
					Triwulan III	80,7
					Triwulan IV	80,7*)
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7,3	Triwulan I	7,3
					Triwulan II	7,3
					Triwulan III	7,3
					Triwulan IV	7,3*)
		Case Fatality Rate Covid 19	Persen	2,5	Triwulan I	2,5
					Triwulan II	2,5
					Triwulan III	2,5
					Triwulan IV	2,5*)
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	120	Triwulan I	120
					Triwulan II	120
					Triwulan III	120
					Triwulan IV	120*)
		Prevalensi Stunting	Persen	8,5	Triwulan I	8,5
					Triwulan II	8,5
					Triwulan III	8,5
					Triwulan IV	8,5*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 87.297.359.583,-
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 19.347.664.704,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.863.573.270,-
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 874.241.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 835.751.190,-
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 3.546.081.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 113.764.670.747

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kesehatan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST





Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan capaian kinerja memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	146.88 per 100.000 KH	80.7 per 100.000 KH	84.36 per 100.000 KH	95.46	56.5	149,3
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	8.3 per	7.3 per	7.59 per	96.03	6.3	120,4

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
		1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH			
3	Case Fatality Covid-19	1.13 %	2.5 %	5.3 %	-12	1.75	3,02
4	Angka Kesakitan DBD/ Incidence Rate (IR) DBD	99.25 per 100.000 Penduduk	120 per 100.000 Penduduk	14 per 100.000 Penduduk	188.33	105	13,3
5	Prevalensi stunting	6.42%	8.5 %	6.45 %	124.12	7	92

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran yang terbagi dalam 5 (lima) indikator. Pada tahun 2023, 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 40% (tercapai $\geq 100\%$) dari total indikator, 2 (dua) indikator hampir memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 40% (tercapai $> 90\%$), sementara itu sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 20% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Angka Kesakitan DBD/Incidence Rate (IR) DBD dengan prosentase 188,33 %, sementara yang mengalami capaian yang rendah adalah Case Fatality rate covid-19 dengan persentase -12%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan. Ada 2 sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2023 yaitu :

- Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya kualitas

3.2.1. Evaluasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan termasuk ke dalam salah satu upaya yang dapat menjadi tonggak utama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan faktor ke tiga yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan di Kabupaten Bantul telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan seperti angka kematian bayi, Angka Kematian Ibu, Case Fatality Rate dan umur harapan hidup yang terus mengalami perbaikan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	AKI	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000
2		Angka Kematian Bayi	Jumlah bayi usia 0 -11bulan yg meninggal dibagi Jumlah kelahiran hidup dikalikan 1000
3		Case Fatality rate Covid-19	Jumlah kematian karena covid -19 dibagi kasus konfirmasi Covid 19 dikali 100

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Case Fatality Rate Covid-19 pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka Kematian Ibu	146,88 per 100.000 KH	80,7 per 100.000 KH	84,36 per 100.000 KH	95,46	56,5	149,3
2.	Angka Kematian Bayi	8,3 per 1.000 KH	7,3 per 1.000 KH	7,59 per 1.000 KH	96,03	6,3	120,4
3.	Case Fatality Rate Covid-19	1,13 %	2,5 %	5,3%	-12	1,75	3,02

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

Capaian kinerja untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 80,7 per 100.000 KH realisasi sebesar 84,36 tercapai 95,46% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 146,88 atau tercapai sebesar 34,41 %, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 61,05%.

Untuk capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami peningkatan. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 7,3 per 1000 KH realisasi 7,59 tercapai 96,03 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 6,3 atau tercapai sebesar 92,21% maka capaian 2023 meningkat sebesar 3,82%. Untuk capaian indikator Case Fatality Rate Covid-19 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 2,5 % realisasi sebesar 5,3%, tercapai -12% atau bernilai kinerja **Sangat Rendah**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar dengan target 2,75% terealisasi 1,13 % atau 158,91% maka capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 170,91%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) untuk IKU angka Kematian Ibu sebesar 56,5 per 100.000 KH. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 149,03% dari target akhir Renstra tahun 2026. Untuk IKU Angka Kematian Bayi telah menyumbangkan 120,4 % dari target akhir Renstra tahun 2026. Untuk Case Fatality Rate sebesar 3,02 % dari target akhir Renstra Tahun 2026.

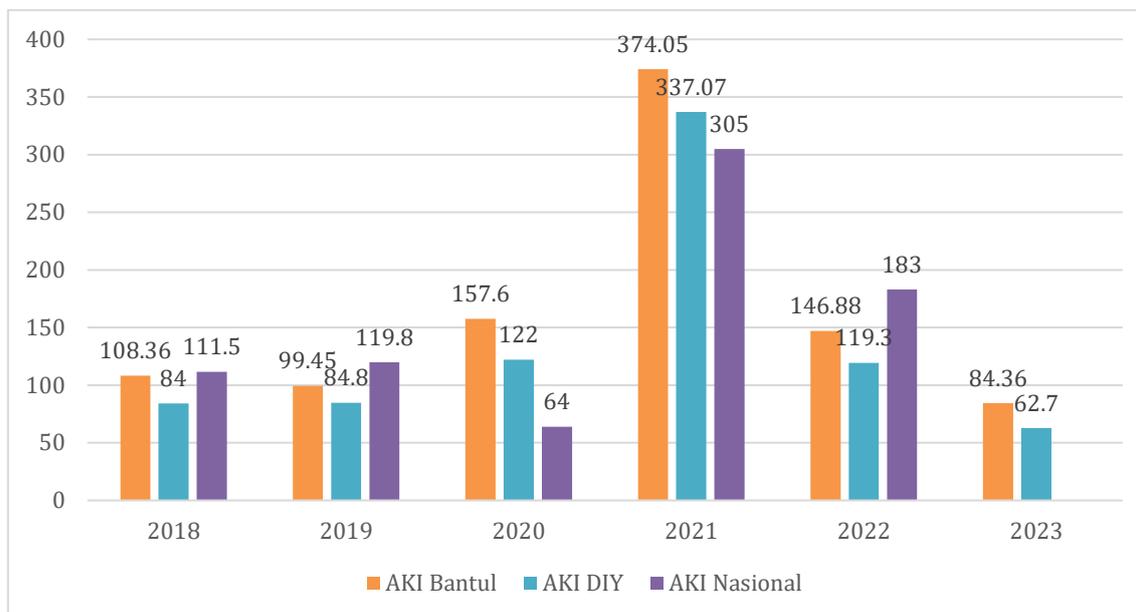
3.2.2. Analisa Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja indikator program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator program strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dari 3 indikator kinerja program yang dinilai, 2 indikator kinerja berpredikat **Sangat Tinggi**, 1 indikator kinerja berpredikat **Sangat Rendah**. Analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja dapat dilihat per indikator seperti berikut:

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2023 mencapai 84,36 per 100.000 kelahiran hidup artinya di Kabupaten Bantul terdapat 9 kasus kematian ibu dari total 10,669 kelahiran hidup. Hal ini menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 146,88 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus kematian ibu). Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2023 terutama dikarenakan kasus infeksi infeksi sebanyak 4 kasus dari 9 kasus atau 44% dari total kasus. Realisasi capaian AKI pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan.

Gambar III.1 Angka kematian Ibu di Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Apabila dibandingkan dengan angka kematian ibu di DIY dan Nasional Kematian ibu di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 capaian sebesar 157,6 per 100.000 KH, mengalami kenaikan di tahun 2021 dengan capaian sebesar 374,05 per 100.000 KH karena adanya pandemi Covid-19, untuk tahun 2022 AKI di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebesar 146,88 per 100.000 KH sedangkan untuk tahun 2023 angka kematian ibu di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dengan capaian sebesar 84,36 per 100.000 KH.

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bantul dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.5 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023

No	Penyebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdarahan	5	4	2	5	4	3
2	PEB/Eklampsi	2	4	5	2	2	
3	Infeksi/Sepsis			5	2	6	4
4	Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah	1	2	5	3	2	1
5	Gangguan Autoimun					1	1
6	Gangguan Cerebrovaskuler					1	
7	Covid-19			2	28		
8	Komplikasi pasca keguguran (abortus)						

No	Penyebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Lain-lain	6	3	2	4		
Jumlah		14	13	20	44	16	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Kematian ibu pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2021. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada kejadian kematian ibu pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 kematian karena Covid-19 sebanyak 28 kasus terutama di bulan Juli ada 23 kasus kematian ibu karena Covid-19. Pada tahun 2022 ada 2 kematian ibu dengan Covid-19 tetapi bukan sebagai penyebab kematian ibu. Pada tahun 2023 tahun terdapat 9 kasus kematian ibu dengan kasus infeksi masih menjadi penyebab terbanyak untuk kematian ibu di Kabupaten Bantul.

Tabel III.6 Analisis Beberapa Faktor Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul

NO	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
1	Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan pengenalan kegawatdaruratan • Keterlambatan merujuk, pemantauan yang kurang optimal, pengisian buku KIA belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kader kesehatan dan SDM • perbaiki kualitas pencatatan dan pelaporan
2	Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> • Respon time tim RS belum terpenuhi, sistem rujukan masih membutuhkan waktu yang lama, kuota poli di RS terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev sistem rujukan, Audit Kematian Internal di RS
3	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan mengambil keputusan, • Adanya Kehamilan tidak di inginkan • Wanita Usia Subur tidak layak hamil • unmet need tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelas Ibu Hamil • edukasi Kesehatan reproduksi
4	Dinas Kesehatan	Keterbatasan anggaran untuk pelatihan, monev puskesmas PONEP belum dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi data KIA, monev pelayanan KIA, peningkatan kapasitas SDM, kerjasama dengan LP/LS

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Upaya dan Langkah Strategis yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu:

- 1) Peningkatan kualitas pemantauan kader dan SDM
- 2) Memperkuat kolaborasi Tim KIA
- 3) Meningkatkan pelayanan ANC Terpadu
- 4) Monitoring dan Evaluasi pengisian buku KIA
- 5) Validasi data KIA

Tabel III.7 Capaian Indikator Kinerja Program yang mendukung penurunan Angka Kematian Ibu

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	84,56 angka
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	1 indeks
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 indeks	1 indeks

Sumber: <https://esakip.kab-bantul.id/>

Gambar III.2 Pendampingan dokter SpOG ke 27 puskesmas



Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Kegiatan Pendampingan dokter SpOG ke 27 puskesmas dengan tujuan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Setiap puskesmas mendapat 3 kali pendampingan dokter SpOG. Kegiatan ini diisi dengan diskusi kasus, pemberian materi oleh konsulen dan drilling kasus kegawatdaruratan.

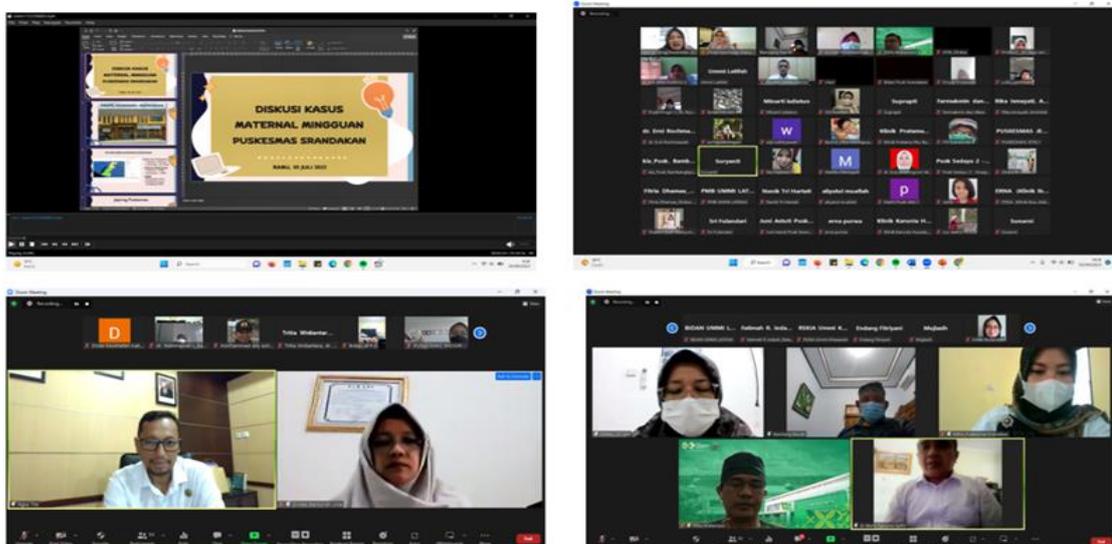
Gambar III. 3 Pendampingan USG oleh residen PPDS Obsgin RS dr. Sardjito UGM



Sumber:Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Kegiatan ini dilakukan di 15 puskesmas sejak tahun 2019, hasil kerjasama UGM dengan Dinas Kesehatan Bantul. USG dilakukan oleh residen kepada ibu hamil berisiko. Selain pemeriksaan USG juga dilakukan konseling dan edukasi kepada ibu hamil.

Gambar III.4 Diskusi Kasus Maternal Mingguan (DISKAS MAMI)



Sumber:Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Kegiatan berupa diskusi kasus maternal berisiko yang diselenggarakan sejak bulan November tahun 2022. Diskas Mami dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 13.00 Wib melalui zoom meeting dengan peserta tenaga kesehatan dari puskesmas, klinik dan Praktek Mandiri Bidan dengan para konsulen dokter spesialis obstetri ginekologi, dokter spesialis lainnya yang terkait. Setiap puskesmas dijadwal oleh dinas kesehatan untuk memaparkan 3 kasus bumil berisiko.

Beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat ketercapaian kinerja Angka Kematian Ibu adalah:

1) Faktor Pendukung:

- Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit dalam mengelola ibu hamil hingga nifas
- Penguatan Sistem Rujukan
- Inovasi oleh Puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

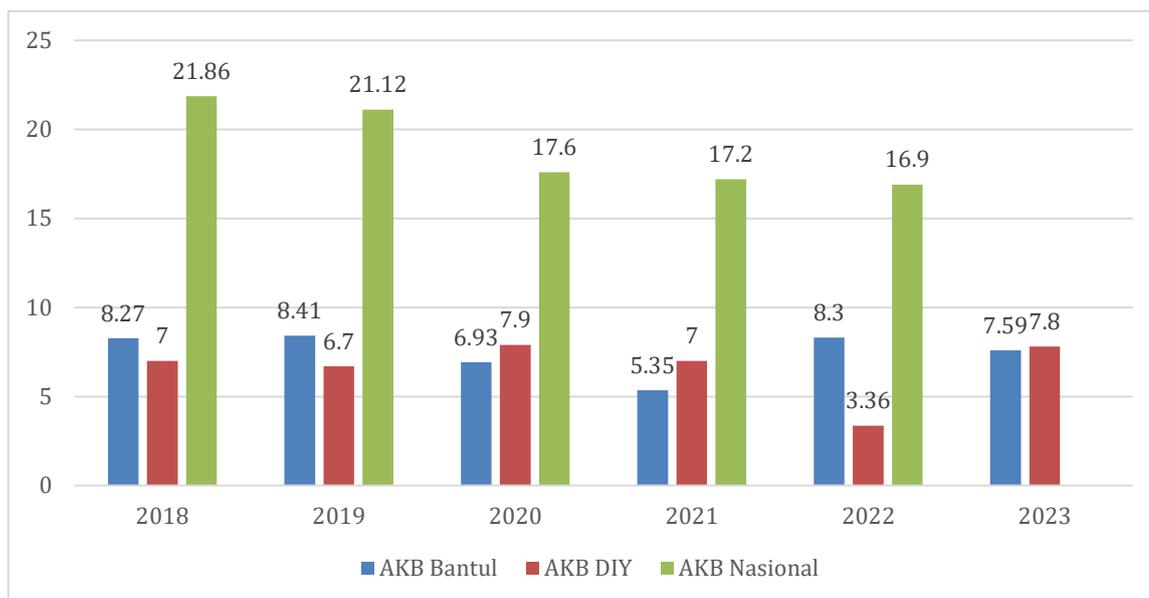
2) Faktor Penghambat:

- Sistem pemantauan ibu belum optimal
- Tingginya ibu hamil berisiko
- Keterlambatan pengambilan Keputusan di masyarakat dan tingkat fasilitas kesehatan

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

Pada tahun 2023 jumlah absolut kematian bayi sebesar 81 kasus menurun dibanding tahun 2022 sebesar 90 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 sebesar 7,59 per 1000 KH dari target 7,3 per 1000 KH terjadi penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 8,3 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar III.5 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dan Apabila dibandingkan dengan data AKB DIY, Kabupaten Bantul memang cenderung lebih tinggi. Penyebab kematian bayi sendiri pada tiap tahunnya beragam, secara lengkap data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel III.8 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022

No	Sebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bayi Berat Lahir Rendah	31	28	16	16	13	15
2	Asfiksia	32	27	16	12	23	16
3	Kelainan bawaan	19	20	26	19	19	21
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	25	35	17	16	33	29
	Jumlah	107	109	75	63	90	81

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Di tahun 2022 dan 2023 kematian bayi terbanyak disebabkan Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya, sedangkan tahun 2020 dan 2021 terbesar disebabkan oleh kelainan bawaan. Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui

program dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel III.9 Analisis Faktor Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul

NO	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
1	Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Deteksi dini IUGR yang terlambat ○ Pemantauan status gizi ibu hamil belum optimal ○ Bumil risti belum mendapatkan penanganan yang optimal ○ Edukasi yang kurang kepada orang tua tentang perawatan pasca kelahiran ○ Kapasitas petugas dalam kegawatdaruratan neonatal belum optimal ○ Keterlambatan deteksi pertumbuhan janin terlambat, ○ pengisian buku KIA belum maksimal, ○ Kunjungan neonatus lengkap belum tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan KIA ○ Pelatihan USG dengan metode BL dan OJT ke RSUD ○ Pelatihan pelayanan KIA dengan sistem BL dengan OJT ke RSUD ○ Memperluas akses pelayanan persalinan, dengan kerjasama faskes primer dengan jejaring PMB ○ Pemanfaatan manual rujukan ○ Pelatihan kegawatdaruratan neonatal sebagai upaya stabilisasi sebelum merujuk ○ Penanganan ibu hamil yang berisiko ○ Optimalisasi kelas ibu dengan sasaran ibu hamil dan keluarganya ○ Edukasi kepada ibu tentang pengenalan tanda bahaya pada janin saat bayi dipulangkan ○ Edukasi kesehatan ibu melalui media sosial, seperti WA group ibu hamil maupun ibu nifas ○ Pemantauan ibu dan bayi selama masa nifas
2	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kesadaran masyarakat ANC secara teratur masih belum baik ● Tingginya kasus bumil risti ● Literasi ibu dalam menjaga kesehatan bayinya masih kurang ● Keterlambatan pengenalan tanda bahaya ● Masih tingginya unmeet need (kelompok rentan yang belum berKB) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA oleh ibu ○ Edukasi persalinan yang terencana dan cara bersalin yang benar ○ Edukasi menjaga kesehatan ibu dan bayi melalui kelas ibu, WA group, kunjungan rumah ○ Edukasi ANC yang teratur ○ Edukasi pengenalan tanda bahaya pada janin, bayi baru lahir ● Edukasi pengaturan jarak kehamilan dengan penggunaan alat kontrasepsi bekerja sama dengan kader dan DP3AP2KB
3	Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> ● Respon time tim RS belum terpenuhi, ● Sistem rujukan masih membutuhkan waktu yang lama, ● Sarana prasarana terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Monev sistem rujukan, ○ Audit Kematian Internal di RS, ○ Penambahan sarpras
4	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Keterbatasan anggaran untuk pelatihan, ● Monev puskesmas PONEB belum dilaksanakan, ● Deviasi implementasi manual rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Validasi data KIA, ○ Monitoring dan Evaluasi pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ○ Peningkatan kapasitas SDM, ○ Kerjasama dengan Lintas Program/Lintas Sektor ○ Pemenuhan sarana dan prasarana

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Upaya dan Langkah Strategis yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi:

- 1) Peningkatan kualitas pemantauan kader dan SDM
- 2) Memperkuat kolaborasi Tim KIA
- 3) Meningkatkan pelayanan ANC Terpadu
- 4) Monitoring dan Evaluasi pengisian buku KIA
- 5) Validasi data KIA, kajian kematian
- 6) Meningkatkan capaian IMD dan ASI Eksklusif
- 7) Sosialisasi pengenalan tanda bahaya neonatus di masyarakat
- 8) Audit internal
- 9) Perbaiki sistem Rujukan
- 10) Pendampingan Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- 11) Pelatihan deteksi dini penyakit jantung bawaan
- 12) Pemenuhan sarana dan prasarana (Antropometri dan Oksimetri)

1. Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung upaya penurunan AKB program sebagai berikut :

Tabel III.10 Capaian Indikator Kinerja Program yang mendukung upaya penurunan Angka Kematian Bayi

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 angka	84.56 angka
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	1 indeks
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 indeks	1 indeks

Sumber: Esakip ROPK, 2023

Beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat ketercapaian kinerja Angka Kematian Bayi adalah:

1) Faktor Pendorong:

- Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit dalam mengelola ibu hamil hingga nifas
- Penguatan Sistem rujukan neonatal dengan komplikasi
- Inovasi oleh Puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan dalam mengelola ibu hamil hingga nifas
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
- Pencatatan dan pelaporan melalui MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) yang lebih baik
- Dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah

2) Faktor Penghambat

- Keterbatasan sarana prasarana di Rumah Sakit untuk kegawatdaruratan neonatal
- Keterlambatan Identifikasi komplikasi pada pertumbuhan perkembangan janin
- Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas kesehatan primer dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal
- Sistem Pemantauan ibu belum optimal.

Gambar III.6 Pendampingan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi di 27 Puskesmas



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Upaya Penurunan AKI AKB dilaksanakan dengan kegiatan pendampingan dokter SpOG ke 27 puskesmas dengan tujuan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Setiap puskesmas mendapat 3 kali pendampingan dokter SpOG. Kegiatan ini diisi dengan diskusi kasus, pemberian materi oleh konsulen dan drilling kasus kegawatdaruratan.

Case Fatality rate Covid-

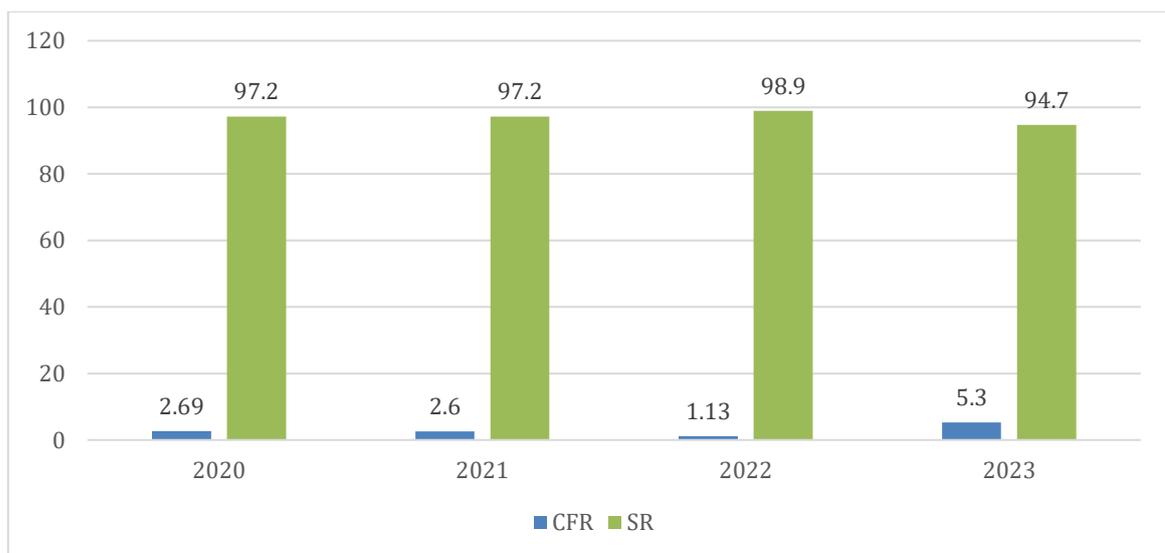
Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19) dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemic. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami dampak dari pandemi COVID-19 yang di alami ini. Pemerintah sudah berusaha untuk bisa melewati ini dengan kesatuan bersama yaitu dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, daerah dan personal.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang terdampak adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Berbagai bidang sangat terpengaruh adanya pandemi ini. Salah satunya adalah Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah yang bertugas untuk membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diharapkan melaksanakan berbagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 kepada warga masyarakat sekaligus menangani pasien ataupun orang terinfeksi virus sehingga angka kesakitan maupun kematian akibat covid 19 tidak meningkat secara *significant* dan penularan segera dapat dihentikan. Kasus kematian akibat covid-19 dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 memang fluktuatif.

Pada tahun 2021 terdapat 53.955 Kasus konfirmasi Covid-19 , dengan 1402 kasus kematian, sedangkan tahun 2022 terdapat 18.483 kasus konfirmasi Covid-19 dengan 208 kematian. Di tahun 2023 kasus covid mengalami penurunan dengan 661 kasus konfirmasi Covid dan 35 kematian. Jumlah kasus sembuh pada tahun 2023 sebanyak 626 orang. Angka kematian akibat covid terutama banyak terjadi pada pasien dengan komorbid.

Tabel III.11 Case Fatality Rate Covid-19 di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Case Fatality Rate (CFR) di Kabupaten Bantul cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar 2,69%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 1,13% sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 5,3%. Kasus kematian tersebut terjadi terutama pada orang dengan komorbid. Untuk angka kesembuhan atau success rate (SR) mengalami penurunan dari angka 98,9 % menjadi 94,70% pada tahun 2023.

Tabel III.12 Analisis Faktor Penyebab Case Fatality Rate Covid-19 di Kabupaten Bantul

NO	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
1	Puskesmas	Penemuan kasus pos covid yang rendah	Kegiatan Tracing, Testing, Treatment tetap dilaksanakan
2	Masyarakat	Masyarakat sudah mulai abai untuk periksa terkait dengan covid	<ul style="list-style-type: none"> • KIE kepada Masyarakat untuk tetap melaksanakan protocol kesehatan
3	Rumah Sakit	Adanya komorbid pada penderita	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tatalaksana covid sesuai standar
4	Dinas Kesehatan	Keterbatasan anggaran logistic pemeriksaan covid	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemantauan pencatatan dan pelaporan covid-19, ○ Pemantauan kewaspadaan dini dan respon ○ Notifikasi cepat ke wilayah untuk tetap melaksanakan 3t

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2023

Beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat ketercapaian kinerja Case Fatality Rate Covid-19 adalah:

1) Faktor Pendorong:

- Fasilitas kesehatan yang memadai untuk tatalaksana covid

2) Faktor Penghambat:

- Angka kemataan lebih besar pada pasien dengan komorbid
- Logistik pemeriksaan swab/antigen yang terbatas
- Penemuan kasus rendah

Selama tahun 2023 berbagai upaya dan langka strategis telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk menekan bertambahnya angka kematian karena covid-19 di antaranya yaitu::

- KIE kewaspadaan lonjakan covid,
- Layanan vaksinasi covid tersedia di fasyankes
- Membuat surat edaran sekda untuk kewaspadaan kenaikan covid
- Menyediakan fasilitas penanganan covid termasuk ruang isolasi
- Tetap memantau kenaikan kasus covid-19
- vaksinasi covid menjadi imunisasi program

SASARAN MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEHAT

3.2.3 Evaluasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat

Perubahan paradigma kesehatan dari paradigma sakit dengan mengedepankan kuratif dan rehabilitatif, berubah menjadi paradigma sehat yang fokus pada promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perubahan paradigma menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama untuk pencapaian derajat kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasal 417 disebutkan bahwa Masyarakat berpartisipasi, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan Kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengkoordinasi partisipasi masyarakat tersebut..

Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan sasaran utama (primary target) dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment), sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Memampukan masyarakat, “dari, oleh, dan untuk” masyarakat itu sendiri. Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Angka Kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD dan Prevalensi Stunting. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Angka Kesakitan Incidence rate (IR) DBD	Penderita DBD pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama x 100.000
2		Prevalensi stunting	Balita pendek dan sangat pendek dibagi balita yang ditimbang x 100%

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

Kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD	99,9 per 100.000 Penduduk	120 per 100.000 Penduduk	14 per 100.000 Penduduk	188,33	105	13,3
2.	Prevalensi Stunting	6,42%	8,5 %	6,45 %	124,12	7	92

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

Capaian indikator Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD mengalami kenaikan. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 120 per 100.000 penduduk realisasi 14 per 100.000 penduduk atau tercapai sebesar 188,33% dan bernilai kinerja **sangat tinggi**. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 99,9 per 100.000 penduduk atau tercapai sebesar 120,60% maka capaian 2023 meningkat sebesar 68%. Sedangkan untuk indikator Prevalensi stunting sebesar 6,45% dari target 8,5% atau sebesar 124,12%. Hal ini berarti bahwa capaian prevalensi stunting mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 6,42%, namun demikian untuk kategori prevalensi stunting tetap bernilai kinerja **sangat tinggi**.

3.2.4 Analisa Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat

Berdasarkan hasil penilaian kinerja indikator program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator program strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dari 2 indikator kinerja program yang dinilai, kedua indikator kinerja berpredikat **Sangat Baik**. Analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja dapat dilihat per indikator seperti berikut:

ANGKA KESAKITAN/INCIDENCE RATE (IR)

DBD

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 120 per 100.000 penduduk terealisasi 14 per 100.000 penduduk atau tercapai 188,33% dan bernilai kinerja **sangat tinggi**. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 99,9 per 100.000 penduduk atau tercapai sebesar 120,60%. Pada tahun 2023 tidak terdapat kasus kematian karena DBD atau meningkat jika dibanding dengan tahun 2022 dengan 5 kasus kematian penderita DBD (Case Fatality Rate) sebesar 0,5%.

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap penyebaran kasus DBD di daerah urban dan semi urban, sehingga hal tersebut menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat internasional.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap penyebaran kasus DBD di daerah urban dan semi urban, sehingga hal tersebut menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat internasional. DBD pada umumnya menyerang anak-anak ≤ 15 Tahun, tetapi dalam dekade terakhir ini terlihat adanya kecenderungan proporsi pada dewasa. Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.15 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus	182	1424	1222	410	957	133
IR (‰)	9,21	151,5	125	42,9	99,9	14
Jumlah Meninggal	0	4	4	1	5	0
CFR (%)	0	0,6	0,3	0,2	0,5	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pengendalian DBD di Kabupaten Bantul:

- Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN
- Foging dan pendistribusian Larvasida
- Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue.
- Penguatan pencegahan kasus DBD dengan upaya PSN, Larvasidasi & Foging
- Audit Kasus DBD
- Evaluasi kegiatan program WoW Mantul

Langkah strategis kedepan untuk pengendalian DBD dalam rangka meningkatkan IKU Angka Kesakitan/Incidence Rate DBD:

- Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik.
- KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor
- Pemberdayaan kader-kader dusun
- Melakukan dan koordinasi di tingkat kecamatan
- Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan.
- Foging Fokus untuk memutus mata rantai penularan
- Upaya Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik
- Advokasi kepada Kepala Daerah untuk dukungan dan kemitraan pengendalian DBD

Program yang dilakukan dalam rangka upaya penurunan incidence rate DBD adalah:

Tabel III.16 Capaian Indikator Kinerja Program yang mendukung upaya penurunan angka kesakitan/incidence rate DBD

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	40 persen	40 Persen

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indeks peningkatan kapasitas SDM	1 Indeks	1 indeks
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	45 kalurahan	45 Kalurahan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat ketercapaian kinerja Incidence Rate DBD adalah:

1) Faktor Pendorong:

- Dukungan dan komitmen kepala daerah serta stakeholder dalam upaya penangan DBD
- Terobosan teknologi terbaru dari World Mosquito Program dalam upaya penangan DBD
- Peran serta komprehensif dari kader, pamong desa dan lapisan masyarakat dalam program WoW Mantul
- Dukungan diagnosa dan tatalaksana di Fasyankes

2) Faktor Penghambat:

- Kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN secara rutin dan serentak belum optimal
- Masih menganggap fogging sebagai pengendalian DBD yang utama
Dalam penanggulangan DBD, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Gambar III.7 Pemberantasan Sarang Nyamuk melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)



Gambar III.8 Egoing dalam rangka Pemberantasan Sarang Nyamuk



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi

stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan peraturan bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 8,5% terealisasi sebesar 6,45% tercapai 124,12% atau bernilai kinerja **sangat tinggi**. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 6,34%. Pada tahun 2023 jumlah kasus balita pendek dan sangat pendek sebesar 2863 balita. Terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3001 balita.

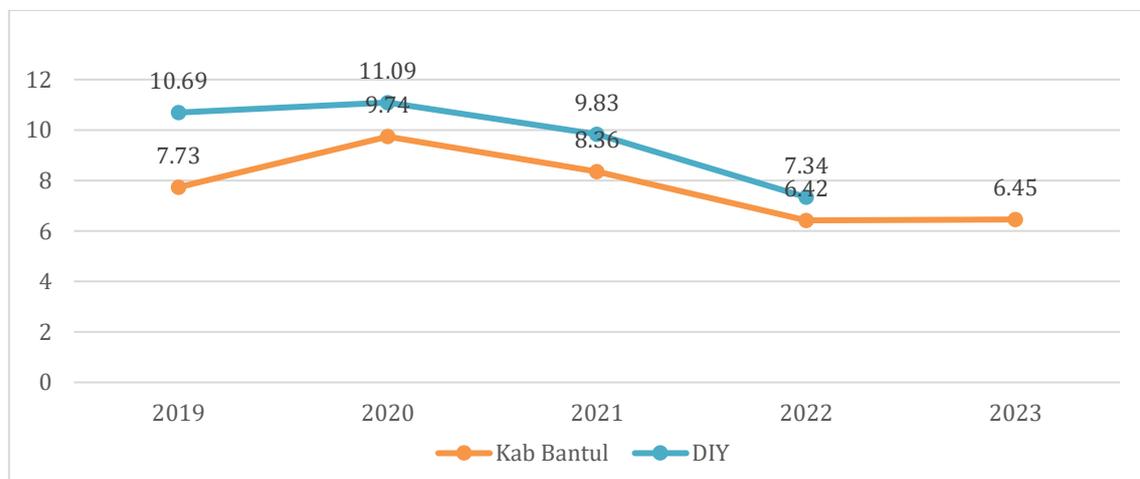
Tabel III.17 Jumlah Balita stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah balita pendek sangat pendek	4733	3725	1816	3996	3001	2.863
Jumlah balita yg diukur tb	48.553	48.181	18.638	47.788	46.722	44.382
Prevalensi Balita Gizi Stunting	9,75	7,73	9,74	8,36	6,42	6.45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Prevalensi Stunting disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar III.9 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul dan DIY tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Trend Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul tahun 2023 dalam kondisi stagnan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penanganan Stunting di Kabupaten Bantul.

Program-program yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan Prevalensi Stunting adalah :

Tabel III.18 Capaian Indikator Kinerja Program yang mendukung upaya penurunan prevalensi Stunting

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	33.33 Persen	33,33 Persen
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indeks peningkatan kapasitas SDM	1 Indeks	1 indeks
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	45 kalurahan	45 Kalurahan

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

Tabel III.19 Analisa dan faktor penyebab Balita Stunting

NO	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
1.	Pola Asuh	Banyak balita yang diasuh oleh pengasuh atau kakek neneknya	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian sosialisasi atau orientasi kepada kader terkait Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak sehingga dapat memberikan pendampingan kepada keluarga balita tentang pemberian makanan dan pengasuhan yang baik dan tepat pada anak
2	Pola Makan yang salah	Pemilihan jenis makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan gizi balita	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian sosialisasi atau orientasi kepada kader terkait Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak sehingga dapat memberikan pendampingan kepada keluarga

NO	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
			balita tentang pemberian makanan yang baik dan tepat pada anak
3	Penyakit Non Infeksi dan Kelainan Bawaan	Kondisi sejak lahir	● Pemeriksaan dokter ahli
	Penyakit Infeksi	Sanitasi kurang baik	● Pemeriksaan dokter ahli
	Riwayat Status Lahir	Riwayat kelahiran berat badan lahir rendah (BBLR) dan panjang badan lahir rendah (PBLR) meningkatkan resiko terjadinya stunting pada balita	Meningkatkan pemantauan kesehatan ibu selama hamil agar kehamilan sehat dan berkualitas sehingga outcome kehamilan sehat
	Konsumsi ASI	Banyak ibu balita terhalang pemberian ASI kepada bayi dikarenakan pekerjaan	Sosialisasi di tempat pemberi kerja untuk menyediakan ruang khusus pemerah ASI (pojok ASI) agar ibu menyusui yang bekerja dapat pemerah ASI dan tetap mampu memberikan ASI pada anak

Sumber; Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Upaya dan Langkah Strategis yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan Prevalensi stunting :

- Pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin
- Pemeriksaan balita stunting oleh dokter spesialis anak, Pemantauan pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama hamil (Fe3), Pemberian asam folat bagi ibu hamil sedini mungkin
- Konvergensi lintas sektor dalam penanganan kasus stunting
- Pelatihan tata laksana asuhan gizi pada balita
- Pendampingan balita gizi buruk oleh kader, Konsultasi dokter spesialis Anak, Konseling oleh nutrisisionis puskesmas/ RS, Pendampingan dengan psikolog puskesmas
- Pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, Menerapkan hasil pelatihan PMBA di posyandu, PMT penyuluhan pada usia pra sekolah
- Konsultasi dokter spesialis anak, Koordinasi dengan lintas sector dan lintas program untuk hygiene sanitasi lingkungan

- PMT Ibu Hamil KEK, Kelas ibu hamil, Konseling sejak caten, Tablet tambah darah bagi remaja putri
- Pendampingan ASI Eksklusif oleh kader pada bayi, Peringatan Pekan ASI Sedunia

Langkah Strategis yang dilaksanakan guna menurunkan Prevalensi Stunting adalah sebagai berikut:

- Pelacakan Epidemiologi & Pendampingan Balita melibatkan LS & Kader
- Penyuluhan tentang gizi seimbang bagi ibu balita (selain posyandu)
- Pemberian PMT pada Balita Malnutrisi
- Skrining Anemia dan Pemberian TTD pada Remaja Putri
- Konseling Gizi pada sasaran 1000 HPK, Caten & Remaja (Siswa)
- Penguatan Konvergensi Lintas Sektor & Lintas Program

Gambar III.10 Pemeriksaan dan pendampingan balita stunting dan malnutrisi oleh dokter ahli (Sp.A) di 27 puskesmas se-Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2023

Gambar III.11 Pemeriksaan balita malnutrisi di 27 puskesmas yang dilakukan oleh dokter spesialis anak.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2023

Pemeriksaan balita malnutrisi di 27 puskesmas yang dilakukan oleh dokter spesialis anak. Dokter anak akan memberikan rekomendasi kepada puskesmas untuk tatalaksananya dan juga memberikan edukasi konseling kepada ibu balita.

Gambar III.12 Pelacakan Aktif Masalah Gizi



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2023

Petugas kesehatan puskesmas bersama kader melakukan pelacakan aktif balita dengan masalah gizi dengan kunjungan rumah.

Gambar III.13 Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Balita dan Anak)



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2023

Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Balita dan Anak) oleh petugas puskesmas kepada kader kesehatan yang berada di masing-masing wilayah kerja puskesmas

Ada faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja prevalensi stunting antara lain:

1) Faktor Pendorong

- Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit dalam Penanganan stunting
- Konvergensi 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh lintas sektor dalam penanganan stunting berjalan baik
- Adanya inovasi dalam penanganan stunting.

2) Faktor Penghambat

- Faktor ekonomi keluarga
- Pola asuh keluarga yang kurang tepat
- Belum semua kader memiliki kompetensi dengan standar yang sama
- Balita yang datang dan ditimbang ke posyandu belum memenuhi target karena mobilitas orang tua balita tinggi, kesadaran untuk memantau tumbuh kembang anaknya kurang

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Kesehatan sebesar Rp239,849,250,545,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp224,703,789,603 atau sebesar 93,68%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.20 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan	151,835,052,267,-	63,3%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat	5,333,856,960,-	2,2%
Jumlah		157,168,909,227,-	65,5 %
Belanja Pendukung		82,860,250,545,-	34,4%
Total Belanja Langsung		239,849,250,545	100%

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp157,168,909,227,- atau sebesar 65,5% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp82,860,250,545,- atau sebesar 34,4% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan dengan besaran anggaran 63,3% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sehat sebesar 2,2% dari total anggaran belanja langsung.

Belanja Dinas Kesehatan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp82,680,341,318,- terealisasi sebesar Rp77,517,712,475,- (93,7%). Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Kesehatan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2023 sebesar 93,6% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 65,5%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,7%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Prevalensi Stunting sebesar 97,8%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Angka Kematian Ibu sebesar 89,9%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat menyerap anggaran paling besar yaitu 98,1% dari target. Sedangkan sasaran kualitas Pelayanan Kesehatan menyerap anggaran terkecil yaitu 96,6% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	80,7 per 100.000 KH	84.36 per 100.000 KH	95.46	81,943,760,408,-	73,738,516,986,56	89,9
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,3 per 1.000 KH	7.59 per 1.000 KH	96.03	69,017.050,859,-	67,397,407,703,02	97,6
3	Case Fatality Rate Covid-19	2,5 %	5.3 %	-12	874,241,000,-	815,447,000,-	93,2
4	Angka Kesakitan DBD/ Incidence Rate (IR) DBD	120 per 100.000 Penduduk	14 per 100.000 Penduduk	188.33	3,470,283,690,-	3,396,098,076,70	97,8
5	Prevalensi Stunting	8.5 %	6.45 %	124.12	1,863,573,270,-	1,838,607,362,-	98,3

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id/>

3.4. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 6,3%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,1%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,2%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Angka Kematian Ibu sebesar 10%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU incidence rate DBD sebesar 2,1%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 6,5% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 1,8% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.22 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	81,943,760,408	73,738,516,986,56	8,205,243,421,41	10
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	69,017,050,859,-	67,397,407,703,02	1,619,643,155,98	2,3
3	Case Fatality Rate Covid-19	874,241,000,-	815,447,000,-	58,794,000-	6,7
4	Angka Kesakitan DBD/ Incidence Rate (IR) DBD	3,470,283,690,-	3,396,098,76,70	74,185,613,30	2,1
5	Prevalensi Stunting	1,863,573,270	1,838,607,362,-	3,396,098,076,70	3,7
Jumlah		157,198,909,227,-	147,186,077,128,31	9,982,832,098,69	6,3
Belanja Langsung Pendukung		82,680,341,318,-	77,517,712,475,-	5,162,628,843,-	6,2
Total Belanja langsung		239,849,250,545,-	224,703,789,603,31	15,145,460,941,9	6,3

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id>

3.5.Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Kesehatan ikut melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Optimalisasi lintas sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas sektor Dinas Kesehatan Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Lintas sektoral	Pihak	Kontribusi	Keluaran	Capaian Kinerja	Manfaat
1	Rujukan Pasien	Lazismu	Ambulance Transport rujukan bagi Masyarakat	Meringankan alur rujukan bagi masyarakat	1 dokumen	Mengurangi beban biaya masyarakat
2	Rujukan Pasien	Lazisnu	Ambulance Transport rujukan bagi Masyarakat	Meringankan alur rujukan bagi masyarakat	1 dokumen	Mengurangi beban biaya masyarakat
3	Perbaikan Gizi	Baznas	Program Suplemen zat gizi mikro bagi balita	Meningkatkan asupan zat gizi balita Kurang gizi	1 dokumen	meningkatkan status gizi

No	Kegiatan Lintas sektoral	Pihak	Kontribusi	Keluaran	Capaian Kinerja	Manfaat
4	Konvergensi stunting	Lintas OPD (Bappeda, DP3AP2KB, PMKal, Dinsos, DLH, Dikpora, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, TP PKK)	Pencegahan dan penanganan stunting	Menurunnya angka stunting	1 dokumen	Meningkatnya status gizi balita
5	Kabupaten Layak Anak	Litas OPD	Lokasi sampel dan dokumen KLA	Tersusunnya dokumen KLA	1 dokumen	Terwujudnya Kabupaten yang layan anak
16	Pokjnal Posyandu	Lintas OPD (Dinas PMKal, TP PKK, DP3KB, DLH, Dinsos, Dikpora)	Pembinaan Posyandu	Posyandu menjadi Aktif	1 dokumen	Meningkatnya PHBS
17	Kab/Kota sehat	Lintas OPD (Bappeda, Dikpora, DLH, DPU, Dinsos, Din Par, Dishub,) & Forkom KKS	Lokasi sampel dan dokumen KKS	Terlaksananya kegiatan pembinaan & Tersusunnya dokumen KKS	1 dokumen	terwujudnya kab yg sehat, bersih dan aman



Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**, kecuali Case Fatality rate Covid-19
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
3. Faktor Penghambat Ketidaktercapaian indikator kinerja Case Fatality Rate Covid-19 adalah Angka kematian lebih besar pada pasien dengan komorbid, Logistik pemeriksaan swab/antigen yang terbatas, Penemuan kasus rendah.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Kesehatan pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Jumlah anggaran cukup
2. Komitmen Pemerintah dalam menangani permasalahan kesehatan
3. Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus berkembang
4. Komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.
2. Perlu dilakukan upaya dalam rangka mengurangi angka kematian akibat Covid-19 yang merupakan salah satu Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Kesehatan
Periode 2022-2026
Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
01	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	72.6
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	6.9
		Case Fatality Rate Covid 19	%	2.25
02	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	115
		Prevalensi Stunting	%	8

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Kesehatan
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	88.7	80.7	72.6	64.5	56.5	56.5
			Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	7.7	7.3	6.9	6.5	6.3	6.3
			Case Fatality Rate Covid 19	%	2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.75
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	125	120	115	110	105	105
			Prevalensi Stunting	%	9	8.5	8	7.5	7	7



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN**

Widhi Wasana Wasana

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367531 / 368828 Fax. (0274) 368828

Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, MMR
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANTUL

dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, MMR
NIP. 197008312002121003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80,7	I	80,7
					II	80,7
					III	80,7
					IV	80,7*)
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	7,3	I	7,3
					II	7,3
					III	7,3
					IV	7,3*)
		Case Fatality Rate Covid 19	%	2,5	I	2,5
					II	2,5
					III	2,5
					IV	2,5*)
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	120	I	120
					II	120
					III	120
					IV	120*)
		Prevalensi stunting	%	8,5	I	8,5
					II	8,5
					III	8,5
					IV	8,5*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. <u>87.297.359.583,-</u>
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. <u>19.347.664.704,-</u>
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. <u>1.863.573.270,-</u>
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. <u>874.241.000,-</u>
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. <u>835.751.190,-</u>
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. <u>3.546.081.000,-</u>
	Jumlah Anggaran	Rp. <u>113.764.670.747,-</u>

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPA BANTUL
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, MMR
NIP. 197008312002121003

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.**

NOMOR : 061/064.C/Ev.SAKIP/2023
TANGGAL : 24 Maret 2023

1

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

- j. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- o. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Berikut ini bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2022:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

- 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

- 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.

d. Bidang Penanggulangan Penyakit, terdiri atas :

- 1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan;
- 2. Seksi Pengendalian Penyakit;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :

- 1. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional; dan

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai rincian tugas, fungsi dan tata kerja dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan kesehatan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan/atau nonperizinan di bidang kesehatan;
- i. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;

4

2. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana, dan Pembiayaan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :

1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
2. Seksi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Kesehatan, Perizinan, dan Kerjasama.

g. Unit Organisasi Bersifat Khusus;

h. UPTD; dan

i. Jabatan Fungsional

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, memformalkan, namun sampai dengan berakhir penugasan reuiu AKIP tanggal 15 Maret 2023 belum dipublikasikan di website.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi esakip dalam rangka

6

pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi Sapa ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Dalam perencanaan sampai dengan pelaporan pengelolaan keuangan telah menggunakan simral dan SIPD

- e. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja namun terdapat satu IKU yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 88,7 per 100.000 KH realisasi sebesar 146,88 tercapai 34,41% atau bernilai kinerja sangat rendah

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- Menyusun langkah strategis untuk menurunkan Angka Kematian Ibu sehingga ada peningkatan capaian dari tahun 2021 namun belum dapat terrealisasi sesuai dengan target
- Melakukan Reviu Rencana Kerja dan Rencana Strategis
- Membuat perbandingan capaian kinerja standar nasional dan instansi sejenis yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Lebih memanfaatkan system informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan sampai dengan pelaporan dengan memanfaatkan data terintegrasi antara lain simral, Esakip ROPK dan DGs Kesehatan

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 84,56. Nilai sebagaimana tersebut di

7

atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,44
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,42
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,71
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,56
			A

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,44 atau 84,80% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,44	84,79
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6	5,50	91,67
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja</i>	9	7,94	88,18

	<i>bidang lain (crosscutting)</i>			
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15	12,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

b) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
- a) Dinas Kesehatan telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
 - b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
 - c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan

- basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
 - e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
 - g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
 - h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

B. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,42 atau 84,70% dari bobot sebesar 30, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	25,42	84,74
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,6	93,33
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,97	88,57
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	11,85	79,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) *Pengukuran kinerja telah dilakukan.*

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65

12

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan 5 IKU.
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD, dan DGs Kesehatan

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, namun terdapat satu IKU yaitu AKI yang belum mencapai target pada 2 tahun terakhir;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, Simas dan DGs Kesehatan.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai

- kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
 - d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,71 atau 84,73 dari bobot sebesar 15 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	12,71	84,71
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,60	86,67
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	4,00	88,89
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,11	81,43

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, namun sampai dengan berakhir surat tugas reviu laporan kinerja belum dipublikasikan ke dalam website Dinas Kesehatan,

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Dinas Kesehatan mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) untuk tahun sebelumnya, Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya namun belum sepenuhnya dapat mencapai target untuk IKU AKI

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21 atau 84% dari bobot sebesar 25 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	84,00
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,75	90,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,75	78,00

16

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja karena satu IKU yaitu AKI belum mencapai target yang ditentukan, meskipun ada peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,78% yaitu dari 85,01 menjadi 84,56 pada tahun 2022.

17

Hal ini disebabkan karena selama 2 tahun terakhir pencapaian IKU AKI tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya meningkatkan kinerja.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
- b. Mempublikasikan laporan kinerja dalam website sehingga bisa mudah diakses setiap saat. **(sudah ditindaklanjuti)**
- c. Meningkatkan upaya dan langkah strategis untuk menurunkan angka kematian Ibu yang capaian kerjanya masih rendah.

B. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 84,56. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap

18

pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦥꦺꦩꦶꦂꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: 64 / PKPT / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2.	Sulami, SE, M.Acc.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Ketua Tim	12 HP
5.	Susiani, S.E.	Anggota	12 HP
6.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
7.	Liana Indiaty, S.T.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	4 HP
8.	Choirudin, A.Md.Kom.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - Kapanewon Kasihan; dan
 - Kapanewon Sedayu.
- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023



Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 08139200046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

Dipindai dengan CamScanner